
Relasi Kuasa Figur Otoritas Pemilik Kapal Dalam Pengaruhnya Terhadap Ketergantungan dan Loyalitas ABK di Dusun Grajagan Pantai, Banyuwangi

Ken Ifa¹, Devira Putri Rahmawati²
Universitas Negeri Surabaya^{1,2}
ken.23220@mhs.unesa.ac.id¹
devira.23066@mhs.unesa.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap relasi kuasa yang terjalin antara figur otoritas pemilik kapal dengan ABK di Dusun Grajagan Pantai, Banyuwangi. Sebagaimana pemilik kapal, yang memiliki kontrol penuh atas sumber daya dan kesempatan kerja, sering kali menempatkan ABK dalam posisi ketergantungan ekonomi yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem peminjaman uang dengan jumlah cukup besar oleh pemilik kapal kepada ABK agar ada keterikatan antara ABK kepada pemilik kapal. Ketergantungan inilah yang juga mempengaruhi loyalitas dari ABK. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana kuasa pemilik kapal mempengaruhi ketergantungan dan loyalitas ABK. Data akan dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pemilik kapal dan ABK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakadilan dalam relasi kuasa antara pemilik kapal dan ABK yang berkontribusi pada terbentuknya loyalitas yang lebih didorong oleh ketergantungan ekonomi daripada hubungan kerja yang sehat dan setara.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Figur Otoritas, Pemilik kapal, Anak Buah Kapal

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.508 garis pantai sepanjang 181.000 km. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki kawasan pesisir yang sangat luas. Selain itu, Perikanan Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya (Boari et al., 2022). Letak geografis Indonesia memengaruhi budaya dan segala aspek kehidupan masyarakatnya. Seperti halnya masyarakat pesisir yang bergantung dengan laut sebagai sumber kehidupan mereka. Masyarakat pesisir merupakan kelompok sosial yang hidup pada daerah peralihan antara darat dan laut serta kehidupan perekonomiannya bergantung dengan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir (Mukhammad Lazuardi Alwan, 2020). Ketergantungan mereka pada Sumber Daya laut menjadikan profesi nelayan sebagai warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Pilihan menjadi nelayan bukan hanya didasarkan dengan kedekatan mereka pada laut tetapi karena pekerjaan ini dinilai tidak memerlukan persyaratan yang formal yang kompleks, serta memungkinkan mereka memanfaatkan langsung sumber daya laut yang tersedia (Putri et al., 2024).

Persyaratan yang dinilai mudah ini menjadikan sebagai masyarakat pesisir yang tidak memiliki modal usaha menginginkan menjadi anak buah kapal karena gaji yang menggiurkan. Mereka percaya bahwa dengan bekerja sebagai anak buah kapal, mereka dapat secara finansial menghidupi keluarga mereka. Maka tidak jarang, karena iming-iming tersebut, mereka menerima tawaran agen secara langsung, tanpa mengetahui jenis pekerjaan, hak dan kewajiban, dan perlindungan hukum yang tersedia untuk mereka di tempat kerja (Muis, 2022). Masyarakat pesisir memiliki ikatan dan interaksi yang intens antar anggota kelompok masyarakat. Interaksi yang ada pada masyarakat pesisir bukan hanya sekedar pertukaran barang maupun jasa, tetapi juga pertukaran nilai, norma dan pengaruh. Interaksi yang ada pada masyarakat pesisir membentuk relasi kuasa, karena adanya proses negosiasi, konflik, serta kolaborasi dalam memeprebutkan sumber daya laut. Relasi kuasa dapat diartikan sebagai hubungan yang dibentuk oleh berbagai pola interaksi antar individu dalam masyarakat yang berkaitan dengan tingkat kekuasaan tertentu (Ainani Fitri, 2022). Relasi kuasa pada masyarakat pesisir, secara tidak langsung akan membentuk struktur sosial masyarakat. Struktur sosial ini ada karena perbedaan kepemilikan modal serta mode produksi.

Pemilik kapal memiliki strata atau status sosial lebih tinggi daripada nelayan buruh atau anak buah kapal (ABK) dikarenakan pemilik kapal memiliki modal yang memadai guna membeli sarana dan prasarana dalam menangkap ikan (Hayat et al., 2022). Pertukaran keuntungan antara bos kapal dengan anak buah kapal (ABK) merupakan pertukaran hubungan antar kedua peran yang melibatkan individu dengan individu yang berbeda status sosial dengan menggunakan pengaruh sumber daya yang dimiliki. Hubungan antara bos kapal dengan anak buah kapal (ABK) menjadi suatu norma yang memiliki kekuatan moral dimana terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksana kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan (Muhartono & Nurlaili, 2019). Relasi kuasa dalam konteks sosial masyarakat pesisir sering kali melibatkan hubungan yang kompleks antara pemilik modal dan pekerja, terutama dalam sektor perikanan. Di Dusun Grajagan Pantai, Banyuwangi, struktur sosial dan ekonomi masyarakat nelayan ditandai dengan adanya hubungan erat antara pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK). Pemilik kapal, sebagai figur otoritas dan pemilik alat produksi, memainkan peran penting dalam menentukan kondisi kerja dan kehidupan ABK. Dalam hubungan ini, kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik kapal tidak hanya berdasarkan

kendali atas sumber daya ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya yang membentuk loyalitas dan ketergantungan ABK terhadap mereka. Relasi kuasa antara pemilik kapal dan ABK bukan hanya hubungan kerja tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, seperti praktik eksploitasi, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, dan ikatan emosional yang memengaruhi kehidupan sehari-hari dan pola kerja mereka.

Relasi kuasa ini sangat memengaruhi bagaimana ABK menavigasi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi di sektor perikanan. Dalam beberapa situasi, ketergantungan ini dapat menyebabkan masalah bagi ABK, terutama ketika kesejahteraan dan kondisi kerja mereka sangat bergantung pada keputusan dan kebijakan pemilik kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana relasi kuasa figur otoritas pemilik kapal mempengaruhi ketergantungan dan loyalitas ABK di Dusun Grajagan Pantai. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini akan menggali dinamika hubungan antara pemilik kapal dan ABK, serta bagaimana otoritas dan ketergantungan membentuk struktur sosial masyarakat pesisir. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak jangka panjang dari ketergantungan tersebut terhadap kesejahteraan ABK dan keberlanjutan usaha perikanan lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan bagaimana kuasa pemilik kapal mempengaruhi ketergantungan dan loyalitas Anak Buah Kapal (ABK). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam mengenai hubungan sosial, dinamika kekuasaan, serta pola ketergantungan dan loyalitas yang terbentuk dalam konteks hubungan kerja di antara pemilik kapal dan ABK. Penelitian ini berlokasi di Dusun Grajagan Pantai, Banyuwangi. Alasan peneliti memilih Lokasi tersebut dikarenakan adanya relasi kuasa antara pemilik kapal sebagai figur otoritas dengan anak buah kapal (ABK). Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang berarti peneliti memilih informan sesuai dengan tema penelitian yaitu bagaimana relasi kuasa pemilik kapal sebagai figur otoritas memengaruhi ketergantungan dan loyalitas anak buah kapal (ABK). Karena sampling informal dinilai dapat memberikan informasi sesuai dengan topik yang dikaji. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif, Dimana peneliti berusaha menggali informasi secara mendalam seseuai dengan topik penelitian Teknik pengumpulan data pada

penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan juga menggunakan sumber sumber daya terkait. Baik penelitian terdahulu. jurnal maupun artikel. Penelitian ini memposisikan peneliti menjadi informan pokok sedangkan lembar observasi adalah lembar pendukung yang digunakan untuk pengumpulan data berupa pengajuan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa relasi kuasa antara pemilik kapal sebagai figur otoritas dengan Anak Buah Kapal (ABK) di Dusun Grajagan Pantai, Banyuwangi, didasarkan pada beberapa faktor yang secara signifikan dapat mempengaruhi ketergantungan dan loyalitas ABK. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi partisipatif, ditemukan beberapa tema utama yang menggambarkan dinamika relasi kuasa ini.

Ketergantungan Ekonomi ABK terhadap Pemilik Kapal

Ketergantungan ekonomi ABK terhadap pemilik kapal terjadi karena mayoritas ABK berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah, sehingga mereka sangat mengandalkan pemilik kapal untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Sebagaimana pemilik kapal memegang kendali atas distribusi pekerjaan, upah, dan kesejahteraan finansial ABK. Ketergantungan inilah yang diperkuat oleh sistem bagi hasil yang diterapkan, di mana upah ABK bergantung pada hasil tangkapan ikan dan keputusan pemilik kapal dalam menentukan pembagian keuntungan. Aturan dalam sistem bagi hasil yang diterapkan bukanlah kesepakatan antara dua pihak melainkan sepihak.

Dusun grajagan pantai merupakan wilayah ujung yang berbatasan langsung dengan grajagan pantai. Dusun ini jauh dari pusat kota dan untuk menuju ke dusun ini harus melewati hutan milik perhutani. Wilayah yang kurang strategis ini memengaruhi perekonomian masyarakat. Masyarakat tidak dapat memiliki pekerjaan yang beragam karena kesulitan akses terhadap sumber daya alam lainnya. Masyarakat dusun grajagan pantai juga memiliki kesulitan akses dalam hal pendidikan sehingga mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan layak. Masyarakat Dusun Grajagan Pantai jarang memilih opsi merantau karena mereka beranggapan tidak adanya keahlian dan ijazah yang dimiliki. Oleh karena itu, masyarakat dusun grajagan pantai diharuskan bergantung oleh sumber daya laut dan ikan sebagai komoditas utama. Karena profesi nelayan merupakan profesi yang tidak diharuskan memiliki serifikasi tertentu dan ijazah minimum. Mereka yang tidak memiliki modal tentu bergantung kepada pemilik modal. Kebutuhan ekonomi menuntut masyarakat grajagan pantai untuk tunduk terhadap aturan yang

telah ditetapkan pemilik kapal. Anak buah kapal (ABK) seringkali ditempatkan pada keadaan serba salah.

Mereka tidak dapat menuntut lebih hak mereka karena takut tidak diperbolehkan bekerja lagi. Keharusan mematuhi aturan dari pemilik kapal merupakan bentuk ucapan terimakasih mereka terhadap pemilik kapal karena sudah diberikan kesempatan bekerja. Sistem bagi hasil yang ditetapkan serta besaran upah yang ditetapkan merupakan paten dan tidak dapat diganggu gugat. Pemilik kapal biasanya menetapkan sistem bagi hasil serta besaran upah dengan melihat sistem bagi hasil dan besaran upah yang ditetapkan oleh pemilik kapal lain. Ketika harga ikan turun, upah yang diberikan pemilik kapal kepada anak buah kapal (ABK) akan dibawah rata rata. Namun anak buah kapal (ABK) tetap bergantung kepada pemilik kapal karena menjadi anak buah kapal (ABK) adalah pekerjaan satu satunya yang dapat mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Ketergantungan ekonomi anak buah kapal (ABK) terhadap pemilik kapal tidak hanya berbentuk pekerjaan tetapi juga hutang piutang.

Wilayah grajan pantai yang kurang strategis dan pengetahuan masyarakat yang minimum mengenai hutang piutang berdampak pada anak buah kapal (ABK) yang seringkali berhutang kepada pemilik kapal dan langsung menyetujui tanpa negosiasi mengenai bunga yang ditetapkan pemilik kapal. Hutang piutang yang terjadi antara anak buah kapal (ABK) dan pemilik kapal secara tidak langsung mengikat anak buah kapal (ABK) untuk tidak dapat berpindah pekerjaan atau menyalahi aturan yang ditetapkan. Hutang piutang yang diberikan oleh pemilik kapal kepada anak buah kapal (ABK) tentu memiliki tujuan tertentu. Pemilik kapal tidak memberikan bunga terhadap hutang piutang yang diberikan melainkan membeli murah hasil tangkap ikan anak buah kapal (ABK). Hutang piutang yang terjadi antara pemilik kapal dengan anak buah kapal (ABK) merupakan sarana untuk memepertahankan ketergantungan dan loyalitas anak buah kapal (ABK) terhadap pemilik kapal.

Dari perspektif anak buah kapal (ABK) terhadap hutang piutang yang terjadi dapat dinilai menguntungkan dan memberatkan. Anak buah kapal (ABK) menilai hutang yang mereka ajukan kepada pemilik kapal merupakan suatu hal yang menguntungkan karena mereka dapat mendapatkan uang secara cepat tanpa jaminan apapun, berbeda ketika mereka mengajukan hutang piutang ke bank yang mengharuskan jaminan tertentu. Namun hutang yang mereka ajukan dinilai memberatkan karena pemilik kapal dapat menentukan hasil jual ikan yang jauh lebih rendah dari kesepakatan bagi hasil yang telah ditetapkan. Meskipun hutang yang mereka

ajukan telah berhasil dilunasi, mereka tidak dapat berpindah bos atau keluar dari pekerjaan karena merasa telah berhutang budi dan terikat oleh norma sosial yang ada.

Faktor Kultural Yang Memengaruhi Ketergantungan ABK Terhadap Pemilik Kapal

Dusun Grajagan Pantai menjunjung tinggi budaya maritim yang turun pada masyarakat mereka. Dimana budaya maritim ini menjunjung tinggi hierarki dan kedisiplinan yang memengaruhi anak buah kapal (ABK) untuk patuh serta taat kepada aturan yang telah ditetapkan pemilik kapal sebagai pemilik modal. Sikap patuh dan taat merupakan tanda penghormatan dan ucapan terimakasih kepada pemilik kapal karena telah memberikan kesempatan belajar kepada mereka.

Meskipun terdapat ketergantungan anak buah kapal (ABK) terhadap pemilik kapal, Anak buah kapal (ABK) juga memiliki solidaritas kelompok yang kuat satu sama lain. Mereka saling membantu ketika ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan. Solidaritas kelompok ini melahirkan komunitas komunitas nelayan yang beragam. Namun solidaritas ini ditujukan untuk menjaga hubungan baik satu sama lain bukan sebagai ajang untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Anak buah kapal (ABK) beranggapan bahwa aturan yang ditetapkan oleh pemilik kapal merupakan hal yang wajar meskipun tidak seimbang antara hak dan kewajiban.

Aturan yang ditetapkan oleh pemilik kapal merupakan sesuatu yang wajar karena pemilik kapal merupakan pemilik modal yang dapat menguasai sumber daya manusia dan alam secara bersamaan. Kurangnya pengetahuan anak buah kapal (ABK) terhadap hak hak yang seharusnya mereka dapatkan tentu memudahkan pemilik kapal untuk dapat membuat aturan sedemikian rupa yang tentu menguntungkan pemilik kapal itu sendiri. Sehingga pemilik kapal sebagai figur otoritas mampu menciptakan ketergantungan dan loyalitas anak buah kapal (ABK) tanpa menciptakan konflik atau pertentangan dari anak buah kapal (ABK) Anak buah kapal (ABK) yang bekerja kepada pemilik kapal tertentu sudah ajeg dan turun temurun. Mereka sudah dipastikan jarang untuk berganti bos karena mereka merasa sudah berhutang budi kepada pemilik kapal. Biasanya anak buah kapal (ABK) ini akan mengikutsertakan anak mereka untuk ikut berlayar dan sudah dipersiapkan menjadi penerus.

Profesi sebagai nelayan juga membebaskan aturan bahwa anak dibawah umur tidak boleh bekerja. Anak usia 10-12 tahun sudah diikutsertakan berlayar guna memenuhi kebutuhan keluarga. Norma sosial yang tidak tertulis dan berlaku di lingkungan maritim seperti keharusan menjaga nama baik pemilik kapal sebagai seseorang yang sudah memberikan kesempatan

bekerja kepada anak buah kapal (ABK). Keharusan menjaga nama baik ini berdampak pada ketidakberdayaan anak buah kapal (ABK) untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakadilan yang mereka alami. Budaya maritim yang ada pada masyarakat Desa Grajagan Pantai, Banyuwangi seperti hierarki dan kedisiplinan, solidaritas kelompok dan norma sosial yang berlaku menjadikan anak buah kapal (ABK) memiliki ketergantungan dan loyalitas sepenuh hati kepada pemilik kapal sebagai figur otoritas. Anak buah kapal (ABK) tidak merasa dikekang atau dijajah hak hak nya karena mereka berpikir bahwa ini merupakan bagian dari budaya maritim yang sudah ada dan mendarah daging secara turun-menurun.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa relasi kuasa antara pemilik kapal sebagai figur otoritas dengan ABK di Dusun Grajagan Pantai sangat dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi dan faktor kultural. Ketergantungan ekonomi ABK terhadap pemilik kapal terjadi karena latar belakang ekonomi yang lemah dan kurangnya akses terhadap pekerjaan lain. Pemilik kapal memegang kendali penuh atas distribusi pekerjaan, upah, dan kesejahteraan finansial ABK, yang diperkuat oleh sistem bagi hasil yang tidak seimbang dan hutang piutang yang mengikat. Selain itu, faktor kultural seperti budaya maritim yang menjunjung tinggi hierarki dan kedisiplinan juga mempengaruhi ketergantungan dan loyalitas ABK. Sikap patuh dan taat kepada pemilik kapal dianggap sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih atas kesempatan bekerja yang diberikan.

Solidaritas kelompok yang kuat di antara ABK juga berperan dalam menjaga hubungan baik, meskipun tidak digunakan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Secara keseluruhan, relasi kuasa ini menciptakan ketergantungan dan loyalitas ABK yang lebih didorong oleh kebutuhan ekonomi dan norma sosial daripada hubungan kerja yang sehat dan setara. Hal ini karena ABK sangat bergantung pada pemilik kapal untuk pekerjaan dan penghasilan, yang diperkuat oleh sistem bagi hasil dan hutang piutang. Meskipun ada solidaritas antar ABK, mereka cenderung tidak memperjuangkan hak-hak mereka karena norma sosial yang ada. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam struktur sosial masyarakat pesisir yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kondisi kerja ABK di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainani Fitri. (2022). Pelaksanaan Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara (Vol. 9). Boari, Y., Ilindamon, A., & Rumaropen, L. D. (2022).
- Peran Kelompok Usaha Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Desa Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. *Journal of Economics Review (JOER)*, 2(2), 61–73. <https://doi.org/10.55098/joer.2.2.61-73>
- Hayat, N., Lazuardi, F., Pambudi, G. A., & Apriansyah, R. (2022). Analisis Struktur Sosial Masyarakat Nelayan Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran. *Alsys*, 2(4), 434–442. <https://doi.org/10.58578/alsys.v2i4.426>
- Muhartono, R., & Nurlaili, N. (2019). Hutang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan Dan ‘Pengambe’ Di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 13(2), 239. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v13i2.6869>
- Muis, A. N. F. (2022). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(12), 988–999. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.346>
- Mukhammad Lazuardi Alwan. (2020). Pola Hubungan Patron-Klien Pada Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan Pasuruan Kota Pasuruan Jawa Timur. Putri, S. M., Haryono, H., & Setiawan, R. (2024).
- Relasi Kuasa Nelayan Pemilik Kapal dengan ABK di Pelabuhan Karangantu, Serang Banten. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 7(1), 240–249. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2004>